

BAB 9 POLITIK

Orang Kristen memiliki dwi kewarganegaraan yaitu warga negara Kerajaan Allah dan warga negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, umat Kristen perlu berpartisipasi dalam kehidupan politik. Bagaimana partisipasi umat Kristen dalam kehidupan politik secara kontekstual alkitabiah?

A. Orang Kristen dan Politik

Umat Kristen seringkali bertanya-tanya: bolehkah gereja atau orang Kristen berpolitik? Atau pertanyaan yang lebih realistis, perlukah orang Kristen terjun ke dunia politik?

Kehidupan umat Kristen di Indonesia masih cukup dipengaruhi oleh tradisi pietisme, dengan ciri-ciri sebagai berikut: pertama, menekankan kesalehan hidup (pietas); kedua, mempertentangkan hal rohani dan jasmani dalam kehidupan manusia; ketiga, hidup jasmaniah merupakan sumber dosa yang membuat tidak saleh, dan jauh dari keselamatan; keempat, untuk mampu hidup saleh orang harus mementingkan hidup rohaniah dan melepaskan hidup jasmaniah.

Negara dengan kehidupan politiknya adalah suatu bentuk kehidupan jasmaniah. Negara dengan dinamika politiknya dianggap sebagai sumber dosa. Karena itu orang Kristen tidak boleh berpolitik, dan kemudian berkembang paham bahwa "Politik itu kotor".

Paham di atas rupanya berdampak munculnya sikap apatis orang Kristen dalam dinamika politik, ditambah dengan adanya pemahaman bahwa orang Kristen itu minoritas dan muncul sindrom minoritas (Belanda: *minderwaardig* = sejumlah perasaan rendah diri). Akibatnya kehilangan semangat untuk berperan dalam kancah politik, yang artinya kehilangan peran untuk menyuarakan suara kenabian. Gejala tersebut juga memperlihatkan bahwa kekristenan menjadi eksklusif, orang Kristen seakan-akan lupa bahwa keberadaannya adalah di tengah-tengah dunia, dan semestinya berperan aktif dalam melaksanakan amanat pembangunan dan pembaharuan demi keselamatan dan kesejahteraan seluruh umat manusia di dunia.

B. Pengertian Politik

Dalam penggunaannya kata politik dipakai dalam tiga arti, pertama, dalam arti luas, politik ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara dan kehidupan bernegara. Berhubungan dengan pengertian ini orang berbicara misalnya tentang ilmu politik.

Kedua, dalam arti sempit, politik adalah kebijakan penyelenggaraan negara yang ditempuh oleh penguasa suatu negara untuk jangka waktu tertentu. Pengertian ini dekat dengan pengertian dalam istilah Yunani "*He politike tekhnē*", yaitu teknik menjalankan atau penyelenggaraan negara.

Ketiga, dalam arti yang peioratif, politik ialah akal licik yang ditempuh oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, yang pada umumnya demi kepentingan atau keuntungan sendiri atau kelompoknya.

Dalam negara kita, terjadi perkembangan politik dalam ketiga arti tersebut. Karena itu dalam praktek politik, sering terjadi ketidak-adilan, penindasan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang bermuara pada kegagalan untuk mencapai tujuan negara. Berdasar pemahaman tersebut umat Kristen memiliki panggilan untuk memasuki dunia politik dengan prinsip demi harkat martabat manusia. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana seharusnya umat Kristen memasuki dunia politik?

C. Kekristenan dan Demokratisasi

Pada intinya persoalan demokrasi mencakup dua hal yaitu struktur dan budaya. Secara struktural suatu negara layak disebut demokratis bila memiliki sistem kehidupan yang adaptif dan akomodatif terhadap aspirasi dari masyarakat. Adapun hal budaya suatu negara disebut demokratis bila kebudayaannya bercorak modern, dalam arti menekankan keunggulan rasional dan pencapaian prestasi demi kemajuan.

Berdasarkan hal diatas, negara yang memiliki tradisi demokrasi niscaya akan memiliki nilai-nilai berikut: penyelesaian pertikaian secara sukarela, tanpa kekerasan, jaminan bagi perubahan-perubahan secara damai, pergantian kekuasaan secara teratur, pemaksaan seminimal mungkin, penegakan hukum demi keadilan dan ketertiban. Pendeknya, mengacu pada pemikiran ahli filsafat John Dewey yang mengatakan bahwa demokrasi adalah way of life. Dari cara masyarakat menjalani kehidupannya sehari-hari, dapat terlihat apakah negara tersebut demokratis atau tidak.

Lantas apakah hubungan antara kekristenan dan demokrasi? Fakta sejarah menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara kekristenan dan demokrasi (Huntington, 1954 :44). Demokrasi modern mula-mula berkembang di negara-negara Kristen Barat. Negara kampiun demokrasi adalah Amerika Serikat, yang menjadi pioneer pada abad ke-18 dalam melakukan pemisahan antara negara dan gereja. Selanjutnya mayoritas negara yang mengembangkan demokrasi pada abad ke-19 adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Protestan.

Penelitian Huntington menyebutkan bahwa semakin besar proporsi penduduk yang beragama Protestan, semakin tinggi tingkat demokrasinya. Ada dua alasan mengapa kekristenan berpengaruh terhadap demokrasi: pertama, Agama Protestan menurut doktrinnya mementingkan kata hati perorangan, hubungan pribadi dengan Tuhan, hak individu untuk membaca Alkitab, dan lainnya, yang tidak seperti peraturan gereja Katholik. Kedua, Gereja Protestan terorganisasi secara lebih demokratis, dengan menekankan keutamaan jemaat, bukan pimpinan atau hirarki gereja.

D. Sikap Kristen Terhadap Kekuasaan

Dalam makalahnya tentang engevaluasi kehadiran gereja di tengah-tengah tuntutan reformasi, Eka Darmaputera mengutip sumbangan T.B. Simatupang tentang sikap terhadap kekuasaan. Sikap yang dimaksud adalah Positif, Kritis, Kreatif, dan Realistis. Urutan itu sesungguhnya mengekspresikan dinamika yang terkandung di dalamnya. Yang dimaksud adalah dalam mewujudkan sikap missioner di tengah-tengah masyarakat harus terus-menerus dipelihara interaksi serta ketegangan antara sikap positif dan sikap kritis dengan realistis.

Itu berarti dalam sikap kita terhadap penguasa, sikap positif hendak mencegah kita dari apriori atau prasangka buruk. Namun sikap positif tidak boleh memperlemah fungsi kita untuk kritis. Karena itu harus selalu terpelihara jarak dengan penguasa. Ada istilah boleh dekat tetapi tidak boleh melekat, atau boleh larut tetapi tidak boleh hanyut.

E. Tanggungjawab Sosial Politik Umat Kristen

Setiap orang dan warga negara mengemban kewajiban dan hak untuk menentukan kehidupan sosial dan politik di mana ia erkait di dalamnya. Warga negara adalah bagian yang integral dari unsur pembentuk masyarakat, bangsa, dan negara. Kehidupannya akan dipengaruhi oleh keadaan sosial dan politik dimana ia berada.

Tanggungjawab sosial dan politik pada hakekatnya merupakan keterlibatan dalam memperjuangkan terwujudnya keadaan dan kehidupan sosial dan politik berdasarkan tujuan-tujuan

yang dimiliki, yang telah disepakati dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Maka tanggung jawab sosial dan politik hanya akan terlaksana dengan baik bila didasari dan dibekali dengan pemahaman dan konsep keadaan dan kehidupan sosial dan politik yang ingin diwujudkan.

Umat Kristen Indonesia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia juga memiliki dan mengemban tanggung jawab sosial politik seperti warga negara lainnya. Umat Kristen Indonesia baik sebagai individu maupun kelompok, juga mengemban tugas untuk turut serta mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian, umat Kristen Indonesia yang hendak mewujudkan tanggungjawab sosial dan politiknya itu dikondisikan di dalam suatu segitiga acuan yang harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan baik dan tepat, yakni iman Kristen itu sendiri, Pancasila, dan keyakinan-keyakinan religius lainnya.

F. Visi Kristen Dalam Tanggungjawab Sosial Politik

Manusia diciptakan Allah sesuai dengan martabat dan hak-hak yang sama, yang melekat pada diri manusia ini sendiri dan tidak dapat diambil oleh siapa pun. Hak-hak itu adalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Manusia ditugaskan oleh Allah Yang Maha Kasih untuk menatalayani alam semesta ini beserta isinya, agar terciptanya masyarakat yang damai sejahtera dengan lingkungan hidup yang lestari. Allah mengasihi semua manusia, dan mengajarkan manusia agar saling mengasihi. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, manusia harus saling mengasihi. Setiap bentuk perselisihan harus diselesaikan dalam suasana kasih.

Manusia itu bersaudara dan manusia yang warga negara bangsa Indonesia adalah bersaudara sebagai suatu bangsa. Selanjutnya bangsa Indonesia membentuk negara RI sebagai wahana bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya.

Dalam negara RI, bangsa Indonesia secara bersama-sama dijiwai perasaan senasib, sepenanggungan, berjuang bahu membahu menjawab semua persoalan bangsa untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah dunia yang kompetitif.

Krisis nasional yang terjadi sekarang ini berakar dari krisis nilai. Oleh karena itu hanya dapat ditanggulangi dengan menyadari dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur umat manusia yang adalah juga milik bangsa Indonesia.

Umat Kristen bersama warga bangsa juga berjuang untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila, di dalam negara RI yang demokratis, menghormati HAM dan melestarikan lingkungan hidup.

Di dalam tanggungjawab sosial politik, umat Kristiani mengacu nilai-nilai yaitu kebebasan berbicara, berkumpul, beragama; kemerdekaan dari ketakutan dan penindasan dari pihak manapun; kerendahan hati dan ketulusan hati; jujur. Kepeloporan yaitu kesiapan mengambil prakarsa untuk meningkatkan prestasi demi kepentingan bersama dan bersikap proaktif; kebenaran dengan berpedoman pada kebenaran Tuhan yang bersifat abadi dan universal, kebenaran akademik dan kebenaran konsensus yang merupakan hasil kesepakatan nasional bangsa Indonesia. Nilai selanjutnya yaitu kasih, kesamaan martabat, hak dan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintah, keadilan, kebangsaan, kesetiaan, dan kesetiakawanan maksudnya bersikap empati, terhadap sukses dan kegagalan orang lain. Setia kepada kawan, tetangga dan masyarakat, terutama pada saat berduka.

G. Partisipasi Umat Kristen Dalam Politik

Setiap orang Kristen sebagai warga negara Republik Indonesia harus ikut ambil bagian dalam bidang politik di negeri tercinta Indonesia, baik secara individu maupun kelompok. Partisipasi ini dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bentuk partisipasi politik antara lain kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan Pemilu (Electoral Activity). Selain itu dalam bentuk keterlibatan orang Kristen ke dalam organisasi sosial politik (Organizational Activity). Melalui berbagai bentuk partisipasi politik diharapkan orang Kristen dapat secara aktif memberikan dukungan kepada pemerintah dalam melayani setiap warga negara. Partisipasi ini juga berguna untuk mampu menunjukkan kelemahan pemerintah dan memberikan masukan-masukan yang membangun dengan harapan ada perbaikan di masa yang akan datang.

H. Makna Dialog Dalam Etika Politik

Dialog dan kerja sama perlu dimengerti sebagai bagian yang fundamental dalam rangka tanggung jawab sosial dan politik demi terciptanya saling pengertian dan keterikatan yang positif dan konstruktif. Dialog harus didasari sikap keterbukaan, kejujuran dan ketulusan hati dan bukan taktik memanipulasi pihak lain. Dengan demikian menunjang terwujudnya komunitas nasional yang sesungguhnya, yang sehat, kokoh dan sejahtera.

I. Tugas Mandiri dan Kelompok

- a. Kumpulkan paper tentang "Pandangan iman Kristen terhadap Hukum"

Berisi: pengertian hukum?

Hukum menurut Alkitab

Hukum Negara Indonesia

Tanggung jawab dan kewajiban orang Kristen terhadap Hukum yang berlaku

Sumber Belajar

- b. Budiarmo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, PN Gramedia
- c. Nuhamara, Daniel, dkk, Modul Acuan Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Kristen, Depdiknas Ditjen Pendidikan Tinggi Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Jakarta
- d. _____, Pendidikan Agama Kristen, PN Bina Media Informasi, Bandung, cet. Ke-1, 2005
- e. Victor Silaen, Pembaruan Gereja dan Demokratisasi Indonesia, dalam buku: Gereja dan Reformasi
- f. Verkuyl, J., Etika Kristen: Ras, Bangsa, Gereja dan Negara, BPK Gunung Mulia, Jakarta

POLITIK

PENGERTIAN POLITIK

- Arti luas, politik ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara dan kehidupan bernegara. Berhubungan dengan pengertian ini orang berbicara misalnya tentang ilmu politik.
- Arti sempit, politik adalah kebijakan penyelenggaraan negara yang ditempuh oleh penguasa suatu negara untuk jangka waktu tertentu (Yun. *“He politike tekhne”*, teknik penyelenggaraan negara)

PENGERTIAN POLITIK

- Umat Kristen harus terpanggil untuk memasuki dunia politik dengan prinsip *demi harkat martabat manusia* (Roma 13:1-7, Fil. 3:20, dll)

KEKRISTENAN & DEMOKRATISASI

Pada intinya persoalan demokrasi mencakup dua hal:

- **STRUKTURAL**, suatu negara layak disebut demokratis bila memiliki sistem kehidupan yang *adaftif* dan *akomodatif* terhadap aspirasi dari masyarakat.
- **BUDAYA** suatu negara disebut demokratis bila kebudayaannya bercorak modern, dalam arti menekankan keunggulan rasional dan pencapaian prestasi demi kemajuan.

SIKAP KRISTEN TERHADAP KEKUASAAN

- ***Positif :***
- ***Kritis:***
- ***Kreatif:***
- ***Realistis:***

TANGGUNGJAWAB SOSPOL UMAT KRISTEN

- Umat Kristen memiliki dwi kewarganegaraan: Warga Kerajaan Allah (Filipi 3:20) dan warga negara Indonesia
- Umat Kristen sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia juga memiliki dan mengemban tanggungjawab sospol seperti warga negara lainnya yaitu mewujudkan cita-cita Pancasila dan UUD 1945.

VISI KRISTEN DALAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL POLITIK

Umat Kristiani mengacu nilai-nilai:

- ✓ **Kebebasan** berbicara berkumpul dan beragama
- ✓ **Kemerdekaan** dari ketakutan dan penindasan dari pihak manapun
- ✓ **Kerendahan hati**
- ✓ **Ketulusan Hati;**
- ✓ **Kejujuran,**

VISI KRISTEN DALAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL POLITIK

- **Kepeloporan** yaitu kesiapan mengambil prakarsa untuk meningkatkan prestasi demi kepentingan bersama dan bersikap proaktif
- **Kebenaran** dengan berpedoman pada kebenaran Tuhan yang bersifat abadi dan universal, kebenaran akademik dan kebenaran konsensus yang merupakan hasil kesepakatan nasional bangsa Indonesia.
- **Kasih**
- **Kesamaan martabat, hak dan kedudukannya** di hadapan hukum dan pemerintah

VISI KRISTEN DALAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL POLITIK

- **Keadilan**
- **Kebangsaan**
- **Kesetiaan**
- **Kesetiakawanan**, maksudnya bersikap empati, terhadap sukses dan kegagalan orang Lain.

MAKNA DIALOG DALAM ETIKA POLITIK

- Dialog dan kerja sama dimengerti sebagai bagian yang fundamental dalam rangka tanggung jawab sosial demi terciptanya saling pengertian dan keterikatan yang positif dan konstruktif

MAKNA DIALOG DALAM ETIKA POLITIK

- Dialog didasari pada keterbukaan, kejujuran dan ketulusan hati dan bukan taktik memanipulasi pihak lain untuk menunjang terwujudnya komunitas nasional yang sesungguhnya, sehat, kokoh dan sejahtera.

Tugas Mandiri